



UPAYAKAN PROGRAM TEPAT SASARAN

## Pengentasan Kemiskinan Butuh Strategi Khusus

**YOGYA (KR)** - Penentuan kebijakan maupun program untuk pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi khusus. Kemiskinan dinilai seperti penyakit yang harus didiagnosis terlebih dahulu guna mendapatkan obat yang tepat. Oleh karena itu penyusunan strategi pengentasannya perlu berbasis pada akar permasalahan.

Walikota Yogya Hasto Wardoyo pun menyoroti pentingnya pencermatan variabel yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur angka kemiskinan. Menurutnya, angka statistik harus diinterpretasikan dengan cermat agar strategi penanganan yang disusun benar-benar tepat sasaran. "Kita harus paham dulu apa yang diukur, karena dari situlah arah kebijakan bisa ditentukan secara bijak dan tepat. Oleh karena itu, penyusunan strategi pengentasan kemiskinan idealnya berlandaskan prinsip 'money follow program' yang menekankan penganggaran harus mengikuti prioritas program strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," urainya, Jumat (24/10).

Menurutnya pendekatan tersebut juga bertujuan

agar alokasi anggaran menjadi lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, namun juga memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, akses ekonomi, dan kesejahteraan jangka panjang. "Strategi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya harus disusun berdasarkan pendekatan simptomatik, berfokus pada penanganan gejala kemiskinan yang tampak di permukaan, serta kausatik untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan lebih mendalam. Jadi bisa dilakukan refocusing anggaran pada variabel tertentu yang punya daya ungkit tinggi untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan," imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pema-

ngunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, menjelaskan berdasarkan data BPS kemiskinan di Kota Yogya mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 0,12 persen dibandingkan tahun 2024 dari 6,26 persen menjadi 6,14 persen. Pihaknya juga mengupayakan penurunan angka kemiskinan tiap tahun sesuai target yang menjadi acuan pembangunan.

Agus juga menyadari strategi khusus yang harus digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Terutama melalui pendekatan komprehensif, partisipatif dan berkelanjutan. Di samping itu aspek yang disentuh juga komprehensif meliputi perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur pemukiman, peningkatan pendapatan, ketahanan pangan, dan penguatan data informasi. Hal itu pun bukan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu melainkan semua kelembagaan. "Butuh kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media yang juga diwadahi dalam Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)," jelasnya.

Sedangkan salah satu warga dari Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kelurahan Sorosutan Kemantren Umbulharjo Tatik Wiprihatin, berpendapat program pengentasan kemiskinan sebaiknya diperbanyak dalam bentuk pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin serta pemberian modal usaha yang sesuai dengan kemampuan dan minat warga. Hal ini agar warga tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tetapi memiliki kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilan. Dengan begitu, mereka bisa membuka usaha secara mandiri dan memiliki penghasilan yang berkelanjutan.

Menurut Tatik pelatihan yang diberikan sebaiknya disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. "Ini agar hasilnya lebih tepat sasaran dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat keluarga," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005